

## **Pengaruh *Good Governance* dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lampung tahun 2018 - 2022**

**Elfira Roza<sup>1\*</sup>, Fefri Indra Arza<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

\*korespondensi : [elfiraroza724@gmail.com](mailto:elfiraroza724@gmail.com)

---

### **Abstract**

*This study aims to obtain empirical evidence and examine the influence of good governance and regional financial independence on local government performance. The population in study consist of all regencies and cities in lampung Province, with a sample of 15 regencies/cities in Lampung Province during the 2018-2022 period. The sampling technique used is saturated sampling, resulting in a total of 75 samples. This researches is a causal study with a quantitative approach. The data used in this study is secondary data. Data analysis was conducted using multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that good governance significantly affects logal government performance.*

**Keywords:** *Local Government Performance; Good Governance; Efficiency; Effectiveness; Regional Independence.*

### **How to cite:**

Roza, E., & Arza, F. I. (2025). Pengaruh *Good Governance* dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2018 - 2022. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 3(3), 336-355. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v3i3.135>

---

### **PENDAHULUAN**

Kinerja merupakan cerminan hasil yang dicapai dalam melaksanakan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi bersangkutan (Mahsun, 2013). Menurut (Gustianra & Serly, 2019) kinerja pemerintah daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk mengelola organisasi sedemikian rupa sehingga tujuan yang diinginkan tercapai. Bahkan (Andirfa, 2018) mengatakan secara sederhana, kinerja seseorang atau organisasi dianggap baik jika hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Ketika suatu pencapaian melampaui target yang telah direncanakan, maka kinerja tersebut dianggap sangat baik. Sebaliknya, jika pencapaian tersebut dibawah target, maka kinerjanya akan di anggap kurang baik.

Kinerja pemerintah daerah itu penting untuk diukur dan dinilai karena telah terjadinya *expectation gap* yang merupakan kesenjangan harapan antara masyarakat dengan para pengelola dan pejabat pemerintah (Mahsun 2013). Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan sebuah lembaga negara seharusnya diukur dari kemampuannya

dalam memanfaatkan anggaran. Dengan demikian, sebuah lembaga dianggap berhasil jika mampu menggunakan 100% APBN, meskipun hasil dan dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dibawah standar. Keberhasilan ini hanya menekankan pada aspek input, tanpa memperhitungkan aspek hasil atau dampak. Pada saat yang sama, masyarakat mengharapkan keberhasilan lembaga-lembaga negara tercermin dalam langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menilai kinerja melibatkan penetapan target dan proses terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis dan memanfaatkan data, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Mardiasmo (2002) mengatakan kinerja pemerintah tidak dapat diukur berdasarkan keuntungan yang direalisasikan, karena lembaga pemerintah bukanlah entitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Hal ini memungkinkan pemerintah mempunyai program atau kegiatan yang programnya menghasilkan pendapatan lebih banyak daripada yang dibelanjakan, sehingga pemerintah dapat memperoleh surplus dari program tersebut.

Menurut (Putu et al., 2018), kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Salah satunya dengan rasio pertumbuhan pendapatan. Rasio pertumbuhan pendapatan ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi – potensi yang dimiliki daerahnya, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya.

Semakin tinggi dan positifnya pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan kapasitas pendapatannya secara konsisten. Kenaikan yang berlanjutan dalam pendapatan daerah tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam strategi pengelolaan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan prioritas daerahnya (Putu et al., 2018). Pertumbuhan pendapatan yang terus meningkat menunjukkan bahwa pemerintah daerah efektif dalam mengelola potensi ekonomi dan mendukung pembangunan. Dengan kata lain, kinerja pemerintah daerah dianggap baik jika mampu mencapai hal – hal tersebut. Untuk melakukan pengukuran rasio pertumbuhan pendapatan, dapat didapatkan dari LKPD yang merupakan bentuk pencapaian kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah pusat selama 1 tahun anggaran.

Kinerja pemerintah masih dibawah standar yang diharapkan, cenderung menunjukkan kualitas yang rendah atau kurang memuaskan. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pemerintahan menurun (Nirwana & Haliah, 2018). Hal ini ditandai dengan munculnya fenomena banyaknya infrastruktur jalan yang rusak di daerah Provinsi Lampung. Fenomena ini ditandai dengan munculnya berbagai desakan dan keluhan dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas pemerintah. Berdasarkan informasi yang didapat dari unggahan Bima Yudha Saputro di akun tiktok @AwbimaxReborn yang diliput dari [Berita - Ombudsman RI](#) memberikan keluhan tentang Lampung dengan judul “Alasan Lampung Tak Maju-maju”. Dengan postingan tersebut warganet terkhusus Lampung banyak memberikan keluhan terhadap kinerja pemerintah daerahnya. Yang lebih banyak dikeluhkan adalah masalah infrastruktur jalan. bahkan warganet juga menyerang akun instagram pribadi Gubernur Lampung. Hal ini terjadi karena pemerintah Provinsi Lampung tidak memberikan platform untuk memberikan keluhan yang dirasakan masyarakat.

Fenomena ini diperjelas dengan informasi yang didapat dari [BBC News Indonesia](#), sewaktu Bapak Jokowi selaku Presiden RI melakukan kunjungan ke

Lampung pada 3 Mei 2023, perbaikan jalan yang rusak akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Sebanyak 15 ruas jalan yang telah rusak parah dalam waktu yang lama dianggarkan sekitar Rp800 m dan akan diperbaiki pada bulan Juni 2023. Hal ini menunjukkan kurang mampunya Pemerintah daerah dalam menangani masalah infrastruktur hingga diambil alih oleh pemerintah pusat. Fenomena ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik atas dasar kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik.

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah *Good governance*. Untuk meningkatkan dan memperkuat kinerja, tata kelola pemerintahan yang baik harus diterapkan dalam konteks pemerintahan Indonesia, terutama ditingkat daerah. Menurut (Rosadi et al., 2022) *Good governance* mengacu pada sistem penyelenggaraan kekuasaan dan administrasi negara yang bertujuan untuk mencapai hal yang diharapkan. Terutama dalam aspek politik, hukum, ekonomi dan sosial. Tentunya hal ini melibatkan tiga entitas penting, diantaranya adalah pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan keterlibatan ketiganya, maka pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien dapat terwujud.

Efisiensi merupakan salah satu indikator dari *good governance*. Efisiensi adalah upaya untuk menghindari pemborosan dan memaksimalkan output dengan input yang tersedia (Mardiasmo, 2018). Artinya efisiensi mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan output yang diinginkan dengan biaya yang minimal (April et al., 2018). Ketika pemerintah mampu mengelola anggaran dan sumber dayanya dengan efisien, maka hal ini dapat berkontribusi langsung pada perbaikan kinerja pemerintah daerah karena alokasi sumber daya yang tepat dan penggunaan anggaran yang hemat akan meminimalkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Semakin rendah efisiensinya, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya.

Indikator *good governance* selanjutnya adalah efektivitas. Menurut (Cahyaning & Putri, 2022) efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam pembangunan dan merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Tingkat efektifitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya melakukan tugasnya, tetapi juga mencapai hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi tingkat efektifitasnya maka semakin baik kinerja pemerintahnya.

Hal lain yang berkemungkinan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berhak mengatur daerahnya sendiri. Hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat menurunkan tingkat ketergantungannya terhadap pusat. Menurut (Permatasari & Trisnaningsih, 2022) rasio kemandirian bertujuan untuk mengukur sejauh mana sebuah wilayah bergantung pada sumber daya eksternal dan mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Ketersediaan sumber keuangan menjadi indikator utama yang sangat penting dalam menilai kapabilitas suatu wilayah dalam mengelola kebutuhan domestiknya sendiri karena pengelolaan daerah memerlukan alokasi biaya yang cukup besar. Untuk meningkatkan kemandirian daerah langkah yang dapat diambil adalah dengan menjaga kestabilan struktur ekonomi agar pemerintah daerah memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya keuangan.

Penelitian ini merujuk pada studi yang dilakukan oleh (Syafdan & Arza, 2024) yang membahas tentang pengaruh tata kelola keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitiannya menghasilkan bahwa tata kelola keuangan yang baik mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Cottalismewati et al., 2022) yang membahas mengenai pengaruh pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah memberikan hasil bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Begitu juga dengan analisis yang dilakukan oleh (Annisa, 2017) berupa pengaruh sistem akuntansi keuangan, manajemen keuangan dan good governance terhadap kinerja pemerintah daerah yang menghasilkan pengaruh positif antara good governance terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, (Permatasari & Trisnaningsih, 2022) membahas mengenai pengaruh kemandirian, efektivitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitiannya menghasilkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, peneliti masih menemukan inkonsistensi tertentu. Hal ini terjadi, kemungkinan karena perbedaan lokasi penelitian dan perbedaan teori yang digunakan. Maka dari itu, peneliti berniat untuk melakukan uji ulang dengan tambahan proksi efisiensi dan efektivitas untuk mendukung variabel *good governance*, dengan menggunakan lokasi penelitian dan pengukuran yang berbeda. Objek penelitian yang dipilih adalah pemerintah Provinsi Lampung. Pentingnya penelitian ini terletak pada sejumlah keluhan terkait pelayanan publik, termasuk masalah infrastruktur jalan yang rusak. Meningkatkan mutu pelayanan publik bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan demikian, diharapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat meningkatkan kinerjanya, sementara OPD yang telah menunjukkan kinerja yang baik diharapkan untuk mempertahankan standar tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menguji bagaimana “Pengaruh *Good governance* dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lampung periode 2018-2022”.

## **REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### ***Agency Theory***

Agency theory pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. (Jensen & Meckling, 1976) mendefenisikan bahwa agency theory adalah kontrak dimana satu orang atau lebih (pemilik) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, namun prinsipal dan agen mempunyai perbedaan preferensi dan tujuan (Halim & Kusufi, 2014).

Praktek kinerja organisasi di sektor publik merupakan konsep yang muncul dari teori keagenan. Teori keagenan menunjukkan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal).

### ***Good Governance***

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *good governance* adalah bentuk pemerintahan atau

penyelenggaraan negara yang jujur, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga unsur-unsur yang ada pada negara, unsur swasta dan juga masyarakat (society). Kerangka kerja ini penting karena melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sehingga tercipta tata kelola yang transparan, efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan. United Nation Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa terdapat sembilan prinsip yang harus diikuti dan diperkuat dalam melaksanakan pemerintahan yang efektif. Diantaranya adalah : partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan berorientasi masa depan.

### ***Kemandirian Keuangan Daerah***

Menurut (Halim & Kusufi, 2014) rasio kemandirian merupakan gambaran tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber daya eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Indeks kemandirian keuangan daerah mencerminkan tingkat pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain, seperti hibah atau pinjaman dari pemerintah pusat. Tujuan dari indeks kemandirian ini adalah untuk menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber daya eksternal dan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah (Permatasari & Trisnainingsih, 2022).

Untuk mencapai kemandirian di setiap daerah, pemerintah perlu berusaha meningkatkan mutu layanan publik kepada masyarakat dan memperbaiki berbagai sektor yang memiliki potensi untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan terhadap bantuan pusat akan rendah. Artinya, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka semakin baik kinerja pemerintah daerahnya.

### **Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja (performance) adalah gambaran sejauh mana implementasi suatu kegiatan/program telah mencapai tujuan, misi dan visi organisasi sebagaimana yang diuraikan dalam merumuskan rencana strategis organisasi tersebut (Mahsun, 2013). Kinerja pemerintah daerah merupakan cerminan keberhasilan suatu kegiatan/program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang tercermin dari hasil-hasil yang dicapai seperti peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022). Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya (Mahsun, 2013).

Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapatkan sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Menurut (Halim & Kusufi, 2014), selama ini pengukuran keberhasilan atau kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat sulit untuk dilakukan secara objektif. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain itu, pengukuran kinerja ini penting dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, dasar pengalokasian sumber daya, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mahsun, 2013). Hasil dari pengukuran kinerja akan memberitahu kita apa yang telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan.

### **Pengaruh *Good Governance* dengan Proksi Efisiensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Efisiensi, sebagai proksi dari *good governance* dalam sektor publik merupakan tentang menciptakan nilai yang lebih besar bagi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada secara bijak dan efektif. (Mardiasmo, 2018) mengatakan efisiensi pemerintah daerah dianggap optimal apabila suatu produk kerja atau hasil yang diberikan dapat dicapai dengan sumber daya dan sarana yang paling sedikit (*spending well*). Semakin rendah efisiensinya, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut dalam mengelola keuangannya.

Didalam penelitian (Marlia, 2020) yang meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Lampung tahun 2015 – 2017 dikatakan bahwa jika nilai rasio efisiensi rendah maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerahnya. Begitu juga dengan (Hamid & Lamuda, 2019), dalam penelitiannya yang membahas mengenai evaluasi kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan indikator rasio efisiensi memberikan hasil bahwa rasio efisiensi berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitiannya berarti semakin rendah efisiensi maka semakin baik kinerja keuangan pemerintahnya. Dari uraian diatas, hipotesis yang diuji adalah :

**H1a:** Dengan Proksi Efisiensi Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh *Good Governance* Dengan Proksi Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Efektivitas, sebagai proksi *good governance* pada intinya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target. Menurut (Mardiasmo, 2018) semakin besar kontribusi output yang dihasilkan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, maka semakin efektif proses kerjanya. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah.

(Permatasari & Trisnaningsih, 2022) dan (Hamid & Lamuda, 2019) dalam penelitiannya mengenai pengaruh rasio efektivitas terhadap kinerja pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa efektivitas mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian mereka berarti semakin tinggi tingkat efektivitas nya maka semakin baik kinerja pemerintahnya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diuji adalah :

**H1b:** *Good Governance* Dengan Proksi Efektivitas Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

### **Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

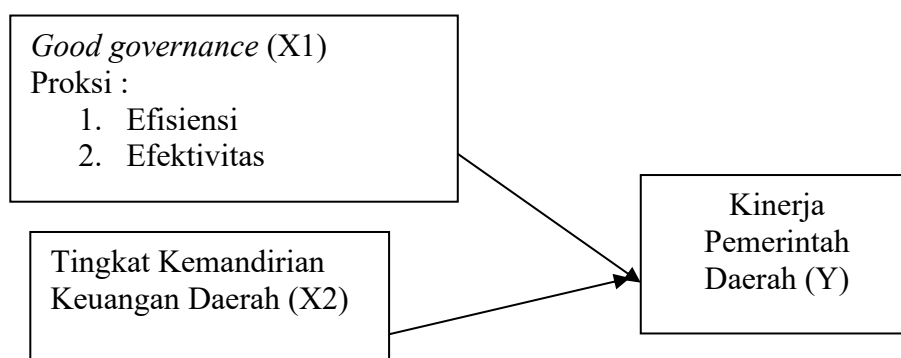
Menurut (Gustianra & Serly, 2019), rasio kemandirian menunjukkan seberapa jauh pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhannya sendiri. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa ketergantungan daerah pada bantuan eksternal dan pemerintah pusat semakin berkurang. Pengawasan legislatif yang ketat dalam proses penganggaran dan realisasi belanja serta pendapatan daerah mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dan mengelola dana sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Dengan pengelolaan yang semakin baik, kemandirian daerah tersebut akan meningkat.

(Permatasari & Trisnaningsih, 2022) menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Rasio kemandirian

daerah menunjukkan sejauh mana masyarakat berkontribusi melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah, yang merupakan faktor utama. Jika masyarakat lebih mampu membayar pajak dan retribusi daerah, maka tingkat kemandirian daerah akan meningkat sebanding. Artinya, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemandirian disetiap daerah, pemerintah harus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki berbagai sektor yang berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, sehingga peneliti memiliki dugaan sementara yaitu :

**H2:** Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kerangka konseptual penelitian dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausalitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Lampung periode 2018-2022. Teknik penentuan sampel ini adalah metode sampling jenuh. Total sampel sebanyak 15 sampel yang merupakan 13 Kabupaten dan 2 Kota. Jadi, terdapat 15 sampel disetiap tahunnya. Total sampel penelitian ini adalah 75 sampel. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi. Data yang digunakan adalah data LHP LKPD pemprov Lampung periode 2018-2022, yang bersumber dari website resmi BPK RI melalui layanan E-PPID.

## Variabel Penelitian

### **Good Governance**

Menurut World Bank, *good governance* adalah tata kelola yang sehat dan akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip pasar yang efektif dan mampu mencegah korupsi secara administratif dan politik. Variabel ini diukur dengan berdasarkan 2 proksi yaitu proksi efisiensi dan efektivitas.

Rasio efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dan jumlah pendapatan yang sebenarnya diterima. Menurut (mardiasmo, 2018) efisiensi pemerintah daerah optimal apabila hasil kerja atau produk tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (*Spending Well*). Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah

lebih baik jika rasio efisiensi relatif lebih rendah. Rasio ini menurut (Mahsun, 2013) mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan kriteria rasio efisiensi sebagai berikut :

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 60% berarti sangat efisien.
- b) Jika diperoleh nilai lebih dari 60% - 80% berarti efisien.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 80% - 90% berarti cukup efisien.
- d) Jika diperoleh nilai lebih dari 90% - 100% berarti kurang efisien.
- e) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak efisien.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) (Mardiasmo, 2018). Artinya, semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. (Mahsun, 2013) mengatakan pengukuran efektivitas berarti mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatannya. Berikut rumus untuk mengukur tingkat efektivitas oleh (Mahsun, 2013).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti sangat efektif.
- b) Jika diperoleh nilai lebih dari 90% - 100% berarti efektif.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 80% - 90% berarti cukup efektif.
- d) Jika diperoleh nilai lebih dari 60% - 80% berarti kurang efektif.
- e) Jika diperoleh nilai kurang dari atau sama dengan 60% berarti tidak efektif.

### **Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian menunjukkan seberapa banyak masyarakat terlibat dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat (Sundari & Arza, 2021). Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, semakin banyak masyarakat terlibat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen penting dari pendapatan asli daerah. Hal ini tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diindikasikan semakin tinggi dengan meningkatnya pembayaran pajak dan retribusi daerah oleh masyarakat. Berdasarkan (Halim, 2004), variabel ini diukur dengan menggunakan data yang didapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat dalam LKPD melalui situs BPK RI dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Jika diperoleh nilai 0 – 25% berarti rendah sekali.
- b) Jika diperoleh nilai 25-50% berarti rendah.
- c) Jika diperoleh nilai 50-75% berarti sedang.
- d) Jika diperoleh nilai 75-100% berarti tinggi.

### **Kinerja Pemerintah Daerah**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah menggambarkan sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan, visi dan misi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat (Mahsun, 2013). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab ini dapat terpenuhi jika pemerintah daerah mampu mengelola potensi yang dimiliki daerah, termasuk sumber daya alam, manusia dan keuangan secara optimal (Cahyaning & Putri, 2022).

Kinerja Pemerintah daerah sangat penting untuk diukur, karena dengan pengukuran tersebut akan melihat akuntabilitas dan *managed* yang telah dihasilkan oleh penyelenggara negara dalam suatu periode tertentu (Halim & Kusufi, 2014). Dalam penelitian ini, kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan. Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan daerah, maka kinerja pemerintahnya akan lebih baik. Begitupun sebaliknya, jika persentase pertumbuhan pendapatannya rendah maka kualitas kinerja pemerintah daerahnya juga rendah. Berdasarkan (Halim, 2004), variabel ini diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

P<sub>n</sub> = Total realisasi pendapatan daerah pada tahun ke-n

P<sub>0</sub> = Total realisasi pendapatan daerah pada tahun ke-0 (tahun sebelumnya)

Dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Jika diperoleh nilai 0 – 10% berarti sangat rendah.
- b) Jika diperoleh nilai lebih dari 10 – 20% berarti rendah.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 20 – 30% berarti sedang.
- d) Jika diperoleh nilai diatas 40% berarti tinggi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sampel Penelitian**

Total sampel dalam penelitian ini adalah 75 sampel. Berikut adalah sampel yang dikumpulkan dari LHP LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lampung periode 2018 – 2022, kemudian dilakukan perhitungan rumus dengan microsoft excel.

a) Perhitungan variabel kinerja pemerintah daerah

**Tabel 1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan**

| No          | Nama Kabupaten/Kota           | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022        |
|-------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1           | Kota Metro                    | -0.05 | 0.09  | -0.01 | 0.02  | -0.04       |
| 2           | Kota Bandar Lampung           | 0.04  | 0.06  | -0.06 | -0.01 | 0.02        |
| 3           | Kabupaten Way Kanan           | 0.03  | 0.01  | -0.08 | 0.01  | 0.01        |
| 4           | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 0.09  | 0.00  | -0.09 | 0.02  | -0.02       |
| 5           | Kabupaten Tulang Bawang       | 0.06  | -0.03 | -0.03 | 0.03  | 0.02        |
| 6           | Kabupaten Tanggamus           | -0.02 | 0.11  | -0.05 | 0.01  | -0.01       |
| 7           | Kabupaten Pringsewu           | -0.04 | 0.05  | -0.02 | 0.06  | -0.03       |
| 8           | Kabupaten Pesisir Barat       | -0.05 | 0.07  | -0.03 | -0.02 | -0.03       |
| 9           | Kabupaten Pesawaran           | -0.03 | 0.00  | 0.00  | -0.03 | -0.01       |
| 10          | Kabupaten Mesuji              | 0.13  | 0.06  | -0.09 | 0.04  | 0.01        |
| 11          | Kabupaten Lampung Utara       | 0.01  | 0.03  | -0.06 | -0.04 | 0.00        |
| 12          | Kabupaten Lampung Timur       | 0.02  | 0.04  | -0.03 | 0.01  | -0.01       |
| 13          | Kabupaten Lampung Tengah      | 0.05  | 0.05  | -0.06 | 0.02  | 0.03        |
| 14          | Kabupaten Lampung Selatan     | 0.00  | 0.10  | -0.07 | -0.02 | 0.03        |
| 15          | Kabupaten Lampung Barat       | 0.05  | 0.00  | -0.10 | 0.00  | 0.02        |
| Rata – Rata |                               |       |       |       |       | <b>0.00</b> |

Sumber : <https://lampung.bpk.go.id> (data diolah)

b) Perhitungan variabel *good governance* proksi efisiensi

**Tabel 2. Rasio efisiensi**

| No          | Nama Kabupaten/Kota           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        |
|-------------|-------------------------------|------|------|------|------|-------------|
| 1           | Kota Metro                    | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.95        |
| 2           | Kota Bandar Lampung           | 0.84 | 0.78 | 0.68 | 0.71 | 0.75        |
| 3           | Kabupaten Way Kanan           | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93        |
| 4           | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 0.88 | 0.89 | 0.98 | 0.94 | 0.94        |
| 5           | Kabupaten Tulang Bawang       | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 0.83        |
| 6           | Kabupaten Tanggamus           | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.80 | 0.85        |
| 7           | Kabupaten Pringsewu           | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.93        |
| 8           | Kabupaten Pesisir Barat       | 0.89 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.83        |
| 9           | Kabupaten Pesawaran           | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.88        |
| 10          | Kabupaten Mesuji              | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 0.88        |
| 11          | Kabupaten Lampung Utara       | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.83 | 0.89        |
| 12          | Kabupaten Lampung Timur       | 0.90 | 0.85 | 0.91 | 0.88 | 0.83        |
| 13          | Kabupaten Lampung Tengah      | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.90        |
| 14          | Kabupaten Lampung Selatan     | 0.89 | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 0.96        |
| 15          | Kabupaten Lampung Barat       | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.94        |
| Rata – Rata |                               |      |      |      |      | <b>0.89</b> |

Sumber : <https://lampung.bpk.go.id> (data diolah)

c) Perhitungan variabel *good governance* proksi efektivitas

**Tabel 2. Rasio Efektivitas**

| No          | Nama Kabupaten/Kota           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        |
|-------------|-------------------------------|------|------|------|------|-------------|
| 1           | Kota Metro                    | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.01        |
| 2           | Kota Bandar Lampung           | 0.83 | 0.78 | 0.70 | 0.76 | 0.87        |
| 3           | Kabupaten Way Kanan           | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97        |
| 4           | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.95        |
| 5           | Kabupaten Tulang Bawang       | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.87        |
| 6           | Kabupaten Tanggamus           | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.89        |
| 7           | Kabupaten Pringsewu           | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.98        |
| 8           | Kabupaten Pesisir Barat       | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 0.84        |
| 9           | Kabupaten Pesawaran           | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.93        |
| 10          | Kabupaten Mesuji              | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.94        |
| 11          | Kabupaten Lampung Utara       | 0.86 | 0.90 | 0.96 | 0.94 | 0.90        |
| 12          | Kabupaten Lampung Timur       | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.88        |
| 13          | Kabupaten Lampung Tengah      | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.96        |
| 14          | Kabupaten Lampung Selatan     | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.97        |
| 15          | Kabupaten Lampung Barat       | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99        |
| Rata – rata |                               |      |      |      |      | <b>0.95</b> |

Sumber : <https://lampung.bpk.go.id> (data diolah)

d) Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah

**Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

| No          | Nama Kabupaten/Kota           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        |
|-------------|-------------------------------|------|------|------|------|-------------|
| 1           | Kota Metro                    | 0.19 | 0.24 | 1.35 | 0.43 | 0.36        |
| 2           | Kota Bandar Lampung           | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.42        |
| 3           | Kabupaten Way Kanan           | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06        |
| 4           | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06        |
| 5           | Kabupaten Tulang Bawang       | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12        |
| 6           | Kabupaten Tanggamus           | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05        |
| 7           | Kabupaten Pringsewu           | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12        |
| 8           | Kabupaten Pesisir Barat       | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04        |
| 9           | Kabupaten Pesawaran           | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07        |
| 10          | Kabupaten Mesuji              | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09        |
| 11          | Kabupaten Lampung Utara       | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04        |
| 12          | Kabupaten Lampung Timur       | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10        |
| 13          | Kabupaten Lampung Tengah      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09        |
| 14          | Kabupaten Lampung Selatan     | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17        |
| 15          | Kabupaten Lampung Barat       | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07        |
| Rata – Rata |                               |      |      |      |      | <b>0.13</b> |

Sumber : <https://lampung.bpk.go.id> (data diolah)

## Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

|                           | N  | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|---------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Efisiensi                 | 62 | .68     | .96     | .8918 | .05003         |
| Efektivitas               | 62 | .70     | 1.00    | .9423 | .05006         |
| Kemandirian               | 62 | .03     | .42     | .0918 | .07365         |
| kinerja pemerintah daerah | 62 | -.08    | .13     | .0063 | .04362         |
| Valid N (listwise)        | 62 |         |         |       |                |

(Sumber : Data Olahan SPSS 29, Tahun 2024)

Tabel 5 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terdapat data valid berjumlah 62 sampel yang berasal dari LHP LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung periode 2018 – 2022. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Hasil uji statistik deskriptif terhadap kinerja pemerintah daerah menunjukkan nilai minimum - 0,08 dan nilai maksimum 0,13 dengan nilai mean 0,0063 dan standar deviasi 0,04362.

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah *good governance*. Sebagai variabel independen, *good governance* diukur dengan menggunakan 2 proksi, yaitu proksi efisiensi dan efektivitas. Hasil uji statistik deskriptif proksi efisiensi variabel *good governance* menunjukkan nilai minimum 0,68 dan nilai maksimum 0,96 dengan nilai rata – rata 0,8918 dan standar deviasi 0,05003. Proksi efektivitas variabel *good governance* menunjukkan nilai minimum 0,70 dan nilai maksimum 1,00 dengan nilai mean 0,9423 dan standar deviasi 0,05006.

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah. Hasil uji statistik deskriptif terhadap kemandirian daerah menunjukkan nilai minimum 0,03 dan nilai maksimum 0,42 dengan nilai mean 0,0918 dan standar deviasi 0,07365.

## Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas**

|                                     |                | Unstandardized Residual |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                   |                | 62                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>    | Mean           | .0000000                |
|                                     | Std. Deviation | .04033730               |
| Most Extreme Differences            | Absolute       | .057                    |
|                                     | Positive       | .057                    |
|                                     | Negative       | -.041                   |
| Test Statistic                      |                | .057                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup> |                | .200 <sup>d</sup>       |
| a. Test distribution is Normal.     |                |                         |

(Sumber : Data Olahan SPSS 29, Tahun 2024)

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini memiliki probabilitas tingkat signifikansi 0,200 yang artinya  $> 0,05$ , maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

### b. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

| Model | Collinearity Statistics |      |       |
|-------|-------------------------|------|-------|
|       | Tolerance               | VIF  |       |
| 1     |                         |      |       |
|       | efisiensi               | .362 | 2.763 |
|       | efektivitas             | .387 | 2.587 |
|       | kemandirian             | .710 | 1.408 |

a. Dependent Variable: kinerja pemerintah daerah

(Sumber : Data Olahan SPSS 29, Tahun 2024)

Tabel 7 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1. Begitu juga dengan nilai VIF, tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independen dalam penelitian ini.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Model        | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |       |      |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|              | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant) | -.042                       | .074       |                           | -.568 | .573 |
|              | efisiensi                   | -.095      | .103                      | -.197 | .357 |
|              | efektivitas                 | .165       | .099                      | .342  | .102 |
|              | kemandirian                 | .036       | .050                      | .109  | .478 |

a. Dependent Variable: ABRESID

(Sumber : Data Olahan SPSS 29, Tahun 2024)

Tabel 8 menunjukkan bahwa setiap variabel independen pada penelitian memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$ . Hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

### d. Uji Auto Korelasi

Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi**

| Model | Model Summary <sup>b</sup> |          |                   |                            |               |
|-------|----------------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
|       | R                          | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1     | .380 <sup>a</sup>          | .145     | .100              | .04137                     | 1.423         |

a. Predictors: (Constant), kemandirian, efektivitas, efisiensi

b. Dependent Variable: kinerja pemerintah daerah

(Sumber : Data Olahan SPSS 29, Tahun 2024)

Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) adalah sebesar 1,432. Nilai Du sebesar 1,6918 dan 4 - Du sebesar 2,3082. Nilai DW harus lebih besar dari pada Du dan harus lebih kecil dari pada 4-Du. Dalam tabel 9 dinyatakan nilai DW sebesar  $1,423 < Du$ . Hal ini menandakan adanya gejala autokorelasi. Maka dari itu butuh penyembuhan karena terjadi autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin – Watson*

dengan metode *Cochrane – Orcutt*. Sehingga, menghasilkan nilai *Durbin Watson* seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi Metode Cochrane - Orcutt**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .271 <sup>a</sup> | .073     | .058              | .03848870                  | 1.775         |

a. Predictors: (Constant), Lag\_Res1

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

(Sumber : Data Olahan SPSS 29, Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson dengan metode Cochrane – Orcutt yang dihasilkan oleh SPSS adalah senilai 1,775. Artinya, nilai DW sebesar  $1,775 > Du (1,6918)$  dan  $1,775 < 4 - Du (2,3082)$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah lulus dari pengujian autokorelasi.

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilanjutkan setelah lulus atau melewati uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji auto korelasi.

**Tabel 10. Hasil analisis Regresi Linear Berganda**

| Model        | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |        |      |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|              | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |        | Sig. |
|              | B                           | Std. Error | Beta                      | t      |      |
| 1 (Constant) | -.076                       | .126       |                           | -.602  | .550 |
| efisiensi    | -.453                       | .176       | -.520                     | -2.574 | .013 |
| efektivitas  | .518                        | .170       | .595                      | 3.046  | .003 |
| kemandirian  | -.024                       | .085       | -.041                     | -.284  | .777 |

a. Dependent Variable: kinerja pemerintah daerah

(Sumber : Data Olahan SPSS 29, Tahun 2024)

Berdasarkan Tabel 11, persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1a} + \beta_2 X_{1b} + \beta_5 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = -0,076 - 0,453 + 518 - 0,024 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan hasil regresi diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh dari persamaan ini bernilai negatif yaitu sebesar -0,076, artinya jika variabel *good governance* (efisiensi dan efektivitas) dan kemandirian keuangan daerah bernilai 0, maka nilai variabel kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar -0,076.
2. Nilai koefisien regresi variabel *good governance* dengan proksi efisiensi bernilai negatif sebesar -0,453 terhadap kinerja pemerintah daerah, artinya semakin meningkat variabel *good governance* dengan proksi efisiensi sebanyak satu – satuan maka akan menurunkan kinerja pemerintah daerah sebesar -0,453.
3. Nilai koefisien regresi variabel *good governance* dengan proksi efektivitas bernilai positif sebesar 0,518, artinya setiap peningkatan *good governance* dengan proksi

efektivitas di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,518.

4. Nilai koefisien regresi variabel kemandirian keuangan daerah bernilai negatif sebesar -0,024, artinya setiap peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja pemerintah daerah sebesar -0,024.

### Uji F (Uji Simultan)

Hasil uji F (Uji Simultan) adalah sebagai berikut:

**Tabel 11. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |       |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
| 1                  | Regression | .017           | 3  | .006        | 3.271 | .027 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | .099           | 58 | .002        |       |                   |
|                    | Total      | .116           | 61 |             |       |                   |

a. Dependent Variable: kinerja pemerintah daerah

b. Predictors: (Constant), kemandirian, efektivitas, efisiensi

(Sumber : Data Olahan SPSS 29, Tahun 2024)

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai signifikansi hasil uji F adalah sebesar 0,027. Hal ini menunjukkan nilai  $0,027 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama variabel *good governance* dengan proksi efisiensi (X1a) dan proksi efektivitas (X1b) dan kemandirian keuangan daerah (X2) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Y).

### Uji t (Uji Parsial)

Hasil uji t (uji parsial) adalah sebagai berikut:

**Tabel 12. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

| Coefficients <sup>a</sup> |             |                             |            |                           |        |      |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model                     |             | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|                           |             | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1                         | (Constant)  | -.076                       | .126       |                           | -.602  | .550 |
|                           | efisiensi   | -.453                       | .176       | -.520                     | -2.574 | .013 |
|                           | efektivitas | .518                        | .170       | .595                      | 3.046  | .003 |
|                           | kemandirian | -.024                       | .085       | -.041                     | -.284  | .777 |

a. Dependent Variable: kinerja pemerintah daerah

(Sumber : Data Olahan SPSS 29, Tahun 2024)

Hipotesis pertama menyatakan bahwa *good governance* dengan proksi efisiensi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai t sebesar -2,574 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,453 dengan nilai sig.  $< 0,013$ . Hal ini berarti *good governance* dengan proksi efisiensi berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja pemerintah daerah karena nilai signifikansi nya  $0,013 < 0,05$ . Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. **(H1a : diterima)**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa *good governance* dengan proksi efektivitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Tabel 13 menunjukkan bahwa

nilai t sebesar 3,046 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,518 dengan nilai sig. 0,003. Hal ini berarti *good governance* dengan proksi efektivitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah karena nilai signifikansi nya  $0,003 < 0,05$ . Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. **(H1b : diterima)**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai t sebesar -0,284 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,024 dengan nilai sig. 0,777. Hal ini berarti kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. **(H2 : ditolak)**.

### Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | .380 <sup>a</sup> | .145     | .100              | .04137                     |

a. Predictors: (Constant), kemandirian, efektivitas, efisiensi

b. Dependent Variable: kinerja pemerintah daerah

(Sumber : Data Olahan SPSS 29, Tahun 2024)

Tabel 14 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-square* pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat senilai 0,100, artinya pengaruh variabel *good governance* dengan proksi (efisiensi dan efektivitas) dan kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah secara simultan sebesar 10%. Sedangkan sisanya 90% dipengaruhi oleh variabel bebas lain diluar variabel yang ada didalam penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada hasil uji statistik t untuk proksi efisiensi memiliki nilai t hitung -2.574 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1a diterima, artinya *good governance* dengan proksi efisiensi berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa jika terjadi penurunan pada efisiensi pada suatu pemerintah daerah, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018 – 2022 yang memiliki tingkat efisiensi rendah, justru menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang menekankan hubungan antara pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal), pemerintah harus bertindak dalam kepentingan masyarakat dan menerapkan prinsip *good governance* untuk meningkatkan kinerjanya (Gustianra & Serly, 2019). Salah satu cara *good governance* berperan adalah dengan memastikan bahwa pemerintah daerah bertindak secara efisien dalam penggunaan anggaran. Artinya, pertimbangan efisiensi diukur dari seberapa hemat daerah tersebut dalam menggunakan anggaran. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin baik kinerja pemerintah daerahnya (Rahayu et al., 2019). Pada penelitian ini pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung periode 2018 – 2022 memiliki

rata – rata rasio efisiensi senilai 0,89 yang tergolong dalam kategori cukup efisien dalam pengelolaan anggarannya.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah *good governance* dengan proksi efektivitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan pada hasil uji statistik t untuk proksi efektivitas memiliki nilai t hitung 3,046 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1b diterima, artinya *good governance* dengan proksi efektivitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa jika terjadi peningkatan pada efektivitas pada suatu pemerintah daerah, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syafdan & Arza, 2024) yang penelitiannya tentang pengaruh *good governance* dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian oleh (Ilham, 2020) yang meneliti tentang pengaruh *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hipotesis merupakan ketiga dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan pada hasil uji statistik t untuk variabel ini memiliki nilai t hitung -0,284 dengan nilai signifikansi sebesar 0,777 lebih besar dari 0,05 sehingga H2 ditolak, artinya kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018 – 2022 yang memiliki tingkat kemandirian daerah yang tinggi, belum bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuktikan bahwa kinerja pemerintah daerah itu baik atau meningkat.

Hasil perhitungan rata – rata rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Lampung periode 2018 – 2022 yang hanya mencapai 0,13 yang merupakan kategori sangat rendah. Berdasarkan teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal untuk mengelola sumber daya secara optimal terutama dalam memanfaatkan pendapatan daerah. Ketika masyarakat berperan dalam membangun daerah melalui kontribusi pajak, tetapi pemerintah tidak mampu memanfaatkannya dengan baik atau tidak mengintegrasikan partisipasi masyarakat kedalam kebijakan dan program pembangunan yang efektif, maka kemandirian tersebut tidak secara otomatis meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ijtihad & Harsono, 2024) yang meneliti tentang pengaruh rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah, yang menyatakan bahwa rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, (Hakiki et al., 2023) juga mendukung hasil penelitian ini, dalam penelitiannya tentang rasio kemandirian daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau, menyatakan bahwa rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya dengan menggunakan 5 tahun pengamatan, dapat disimpulkan bahwa: (1) *Good governance* dengan proksi efisiensi berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja pemerintah daerah Lampung periode 2018 - 2022. (2) *Good governance* dengan proksi efektivitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah Lampung periode 2018 - 2022. (3) Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Lampung periode 2018 – 2022.

### Keterbatasan

Dari hasil analisis dan kesimpulan, penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain yaitu Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen dalam penelitian ini. Sedangkan nilai *Adjusted R-square* hanya 10%. Artinya masih terdapat banyak variabel lain yang memungkinkan untuk mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, peneliti hanya mengukur kinerja pemerintah daerah dari sisi keuangan saja tanpa memperhatikan pengukuran non keuangan lainnya.

### Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka dapat disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa menambahkan variabel lain untuk menguji pengaruh kinerja pemerintah daerah, melakukan analisis lebih dalam dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif terkait kinerja pemerintah daerah dan menambahkan variabel non keuangan untuk melihat pengaruh kinerja pemerintah daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M. (2018). Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. In A. Maryana, SE., M.Si. & M. S. Bobby Rahman, S.Sos. (Eds.), *unimal press* (pertama, p. 87).
- Annisa, V. (2017). The Effect Of Financial Accounting System, Financial Management Area, And Good Governance Of Local Government Performance. *JOM Fekon*, 4(1), 2017.
- April, P., Akuntansi, J. R., Purnomo, B. S., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(3), 467–480. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886>
- Cahyaning, E., & Putri, F. (2022). Pengaruh Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(4), 257–263. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i4.85>
- Cottalismewati, Asmeri, R., & Silvera, D. L. (2022). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Pareso Journal*, 4(1), 149–168. <http://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/523%0Ahttps://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/download/523/530>
- Gustianra, V., & Serly, V. (2019). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1426–1442. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.152>

- Hakiki, D., Tumija, & Agustina, I. (2023). Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 10(1), 56–78. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP>
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah* (1 revisi).
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). salemba empat.
- Hamid, A., & Lamuda, I. (2019). Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money. *Gorontalo Accounting Journal*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.32662/gaj.v2i1.556>
- Ijtihad, R., & Harsono, I. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Repository Universitas Mataram*, 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.732>
- Ilham, Y. (2020). Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi pada kantor sekretariat DPRD kota palopo). *Repository Universitas Muhammadiyah Palopo*, 303. <http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/314>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*. 3(4).
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (1st ed.). BPFE - YOGYAKARTA.
- Marlia, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Tahun 2013 - 2017 dalam perspektif ekonomi islam. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Mulyaningsih, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus: BPPKAD Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. 2022. Issue Period, 6(3), 612–622. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i3.819>
- Nirwana, & Haliah. (2018). Determinant factor of the quality of financial statements and performance of the government by adding contextual factors: Personal factor, system/administrative factor. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 28–40. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0014>
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Putu, N., Sukma, G., Bagus, I., & Sedana, P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110.
- Rahayu, Y. K. F., Sarwono, A. E., & Sunarti. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014-2018. *Universitas Slamet Riyadi Suarakarta*, 15, 443–450.
- Rosadi, I., Saleh, H., & chahyono. (2022). *Good Governance perspektif kinerja keuangan daerah* (T. A. F. Menne (ed.)). pusaka almaida makassar.
- S. B Seran, M. (2021). Value For Money : Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe.

*Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 94–101.  
<https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1610>

Sundari, N., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Faktor Keuangan Dan Faktor Non Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 218–232. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.345>

Syafdan, T. A., & Arza, F. I. (2024). pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah: studi empiris pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 284–295.